

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri narasi para aktor yang muncul akibat adanya usulan pengadaan KRL bekas dari Jepang yang diajukan oleh PT KCI sebagai perusahaan pengelola KRL. Alasan pengadaan harus dilakukan secara cepat mengingat pada tahun 2023 akan ada 10 rangkaian kereta dan pada tahun 2024 akan ada 19 rangkaian kereta yang harus dipensiunkan, Narasi para aktor ditelusuri lewat laman berita media daring dari tanggal 27 Februari-8 April 2023. Narasi aktor di analisis menggunakan *Narrative Policy Framework* yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemetaan aktor menggunakan analisis *stakeholder* berdasarkan kerangka *power interest grid*. Penelusuran narasi ini kemudian menemukan 11 aktor yang terlibat dalam isu pengadaan KRL bekas yang terbagi menjadi tiga kubu berdasarkan keberpihakannya yaitu, pro, kontra, dan netral. Dalam penelusuran ditemukan konflik yang muncul berasal dari tiga hal penting yaitu, buruknya perencanaan yang dilakukan PT KCI, lambannya pemerintah merespon usulan kebijakan, serta komunikasi dan koordinasi *stakeholder* terkait tidak berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** *Narrative Policy Framework, Stakeholder, Impor KRL Bekas*

## **ABSTRACT**

*This study aims to explore the narratives of the actors that arose as a result of the proposal to procure used commuter line train (KRL) from Japan put forward by PT KCI as the KRL management company. Procurement must be carried out quickly considering that in 2023 there will be 10 train sets and in 2024 there will be 19 train sets that must be retired. The narratives of the actors are traced through online media news pages from February 27 to April 8, 2023. The actor narratives are analyzed using the Narrative Policy Framework which is then continued by mapping actors using stakeholder analysis based on the power interest grid framework. This narrative found 11 actors involved in the issue of the procurement of used KRL which were divided into three groups based on their alignments namely, pros, cons and neutral. The investigation found that the conflicts that arose came from three important things. It was poor planning carried out by PT KCI, the government was slow to respond to policy proposals, and communication and coordination of related stakeholders did not go well.*

**Keywords:** Narrative Policy Framework, Stakeholder, KRL Procurement